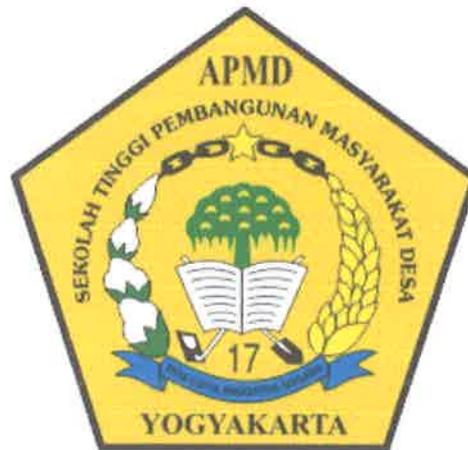


SKRIPSI

**INOVASI PEMERINTAH DESA DI SEKTOR PERTANIAN
DI PADUKUHAN NOLOGATEN KALURAHAN CATURTUNGGAL
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN**



Di Susun Oleh:

VENAN MAX SYUKUR

NIM : 18520055

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



**INOVASI PEMERINTAH DESA DI SEKTOR PERTANIAN
DI PADUKUHAN NOLOGATEN KALURAHAN CATURTUNGGAL
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

APMD
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)



DISUSUN OLEH :
VENAN MAX SYUKUR

18520055



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 04 Februari 2022
Pukul : 14:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P
Pembimbing dan Ketua Penguji
2. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA
Penguji I
3. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D
Penguji I



Mengetahui Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Venan Max Syukur

NIM : 18520055

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Inovasi Pemerintah Desa Di Sektor Pertanian Di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 02 Februari 2022

Yang Menyatakan


VENAN MAX SYUKUR

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraanNya dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya tulis ini saya persembahkan untuk semua orang yang berarti dalam hidup saya :

1. Untuk Ayahanda Fransiskus Jemparu (Frans Jem) dan Ibunda Rosalia Damul yang tak pernah lelah untuk berdoa, memberi dukungan moril maupun material serta nasehat tiada henti untuk kebaikan masa depan penulis. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian sebagai bentuk pembuktian awal penulis, jika suatu ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama penulis akan menjadi orang yang berguna bagi Gereja, tanah kelahiran dan bisa membanggakan kalian. Terimakasih tak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayang kalian kepadaku, semoga senantiasa kalian selalu diberi rahmat kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2. Untuk saudara-saudari saya; Priska Oda ganus, Klaudius Sandri-Yustina Helena Nona, Dionesius Jemadi-Emiliana Danul. Terimakasih banyak sudah mendukung saya dan mengimbangi Ayahanda dan Ibunda dalam kelancaran studi saya. Semoga kalian senantiasa diberikan rahmat kesehatan, keberkahan dan segala usaha dan niat baiknya selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa.
3. Untuk ponakan-ponakan saya; Agnesia Windi Murni, Risensiano Oktaviano Pratama, Yohanes Saputra Garut, Tania, Devano dan Jorginho. Terimakasih

sudah menjadi penghibur dan penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi strata satu (1). Semoga kalian bisa bertumbuh dan berkembang menjadi anak berprestasi kelak bisa berguna bagi Gereja, Bangsa dan membangakan keluarga besar.

4. Untuk teman spesial saya; Mikelin Arдания. Terimakasih sudah mendukung penuh dan menjadi suporsistem bagi penulis dalam menyelesaikan studi strata satu (S1).
5. Untuk keluarga besar, sahabat dan kerabat penulis yang tidak bisa disebutkan satupersatu. Terimakasih banyak atas dukungan, nasehat dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan studi strata satu (S1).

MOTTO

“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu”

(Ams. 3:5-6)

“Kita takut kehilangan apa yang kita miliki, entah itu hidup kita, ataupun barang-barang dan tanah kita. Tapi ketakutan ini lenyap saat kita memahami bahwa kisah hidup dan sejararah dunia ditulis oleh tangan yang sama”

~Paulo Coelho~

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Inovasi Pemerintah Di Sektor Pertanian Di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon DepokKabupaten Sleman” ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekuarangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

4. Untuk Ibu Utami Sulitiana, S.P., M.P. telah sabar dan setia membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi.
5. Untuk Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA selaku dosen penguji satu.
6. Untuk Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku dosen penguji dua.
7. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
9. Bapak Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal beserta perangkat Kalurahan.
10. Bapak Sulistyoko Eko Narmono selaku Dukuh Nologaten.
11. Masyarakat Kalurahan Caturtunggal khususnya Masyarakat Padukuhan Nologaten yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini, serta memberikan dukungan kepada penulis.

12. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 01 Februari 2022

Penulis,



Venan Max Syukur

INTISARI

Penelitian ini berjudul “Inovasi Pemerintah Desa di Sektor Pertanian di Padukuhan Nologaten Kalurahan caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten sleman: Studi Governing pemerintah Kalurahan Caturtunggal di Sektor Pertanian.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengeksplorasi Inovasi Pemerintah Desa di sektor pertanian di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan endekatan eksplorasi. Obyek dalam penelitian ini adalah Perencanaan program/kebijakan di sektor pertanian, Penganggaran untuk membiayai program/kebijakan di sektor pertanian, dan Pelaksanaan program/kebijakan di sektor pertanian.

Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal melakukan inovasi di sektor pertanian di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal. Dalam menunjang keberhasilan di sektor pertanian, pemerintah Kalurahan Caturtunggal menggandeng pemerintah Kapanewon dan Kabupaten untuk memberikan bantuan dan pelatihan seperti pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan akuakultur dan hidroponik atau budidaya pertanian terpadu yang bisa diterapkan pada lahan terbatas atau yang biasa di sebut dengan Akuaponik. Pemerintah kalurahan Caturtunggal juga menginisiasi pembentukan Kelompok Wanita Tani dan membuat demplot atau lahan percontohan setiap Padukuhan untuk mengembangkan konsep akuaponik.

Kata Kunci : Inovasi, Pemerintah Desa, Sektor Pertanian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wacana yang sering muncul dalam pembahasan dan menjadi sebuah kekhawatiran sebagian besar negara-negara di dunia termasuk di Indonesia yaitu berkaitan dengan ketahanan pangan baik pada tingkat rumah tangga, regional, nasional maupun global. Diketahui bahwa, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hal ini juga sebagaimana tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian dari ketahanan pangan itu sendiri yaitu merupakan fenomena yang cukup kompleks hal ini karena meliputi banyak aspek sehingga setiap orang mencoba untuk mengubahnya sesuai dengan tujuan dan ketersediaan data (Dirhamsyah, 2016). Pengertian ini juga tidak lepas dari Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif secara berkelanjutan.”

Pada masa saat ini masalah pangan masih merupakan salah satu isu global yang juga merupakan persoalan serius di Indonesia. Dalam Undang-Undang diperjelas pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan,

namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*), dengan kemandirian pangan (*food resilience*), serta keamanan pangan (*food safety*). Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya pada masa sulit seperti sekarang ini sektor pertanian menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia akibat pandemi. Dari sini petani sebagai tonggak utama pada pemenuhan pangan masyarakat juga merasakan dampaknya. Seperti harus memenuhi permintaan yang cukup tinggi, menjamin kualitas produk, jalur distribusi, dan banyak hal-hal lain yang membutuhkan penyesuaian strategi agar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan ketahanan pangan pada masa pandemi di Indonesia tetap terjamin. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama. Oleh karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Suarsana (2020), Pangan merupakan kebutuhan jasmani yang tak terelakkan, yang dalam istilah Antropolog Melville J. Herkovitas yaitu *the primary determinants of survival* (penentu utama kelangsungan hidup) bagi umat manusia. Ketahanan pangan merupakan topik yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh banyak pihak sebagai konsekuensi dari dampak penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Setelah bergulat dengan masalah kesehatan dan daya beli masyarakat, pasokan pangan menjadi isu sentral lainnya yang perlu penanganan sesegera

mungkin. Sektor pertanian harus menjadi perhatian karena urusan ini merupakan sektor paling dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Beberapa ahli menyatakan bahwa salah satu langkah strategis untuk mengembangkan sektor pertanian adalah melalui pengorganisasian. Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkret untuk dapat memberdayakan masyarakat itu secara lebih baik. Salah satu langkah pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan sektor pertanian adalah melalui pembentukan organisasi Kelompok Wanita Tani (KWT). Hal ini sejalan dengan dengan pendapat Mosher yang mengatakan bahwa salah satu syarat untuk memperlancar pembangunan pertanian adalah adanya kerjasama kelompok tani sehingga perlu adanya pengorganisasian wadah petani yang berupa kelompok tani (Mayanfa'uni, 2016). Kelompok Wanita Tani merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi kaum perempuan sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam memajukan sektor pertanian yang ada di desa. Selain itu, Kelompok Wanita Tani merupakan bentuk perkumpulan ibu-ibu untuk menampung aspirasi perempuan tani. Jadi, Kelompok Wanita Tani merupakan organisasi yang dibentuk atau wadah tempat berkumpulnya ibu-ibu dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan menuju kesejahteraan petani (Alam, dkk, 2019). Kelompok Wanita Tani memiliki potensi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu Kelompok Wanita Tani dapat berperan untuk meningkatkan pendapatan petani guna mengurangi pengeluaran konsumsi dan kelestarian lingkungan. Pada

masa ini tidak hanya dari aspek penyediaan pangan melalui usaha swasembada pangan, namun yang lebih penting adalah mewujudkan ketahanan pangan untuk mengurangi masyarakat yang rawan pangan. Saat ini, hampir seluruh wilayah di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan sudah memiliki perkumpulan dalam bentuk Kelompok Wanita Tani (KWT). Hal ini menegaskan bahwa pengorganisasian terhadap masyarakat tani merupakan hal yang penting dalam memajukan sektor pertanian di desa. Dengan adanya Kelompok Wanita Tani (KWT) dapat dikatakan bahwa kepedulian masyarakat dalam berpartisipasi untuk meningkatkan perekonomian keluarga sudah cukup baik.

Kalurahan Caturtunggal merupakan salah satu Kalurahan yang berada di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Kalurahan Caturtunggal salah satu Kalurahan yang mengembangkan program di sektor pertanian yang sudah cukup lama berupa padi, sayur-mayur yang di budidayakan secara bersama dengan ikan dalam satu wadah atau media tanaman dan tanaman lainnya. Berdasarkan hasil observasi masalah di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, masih memiliki keterbatasan di sektor pertanian. Keterbatasan ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan lahan/menyempitnya lahan pertanian, kurangnya sukongan dana, kurangnya sosialisasi serta pelatihan dari pemerintah dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, inovasi pemerintah desa sangat dibutuhkan di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi petani.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh **“Inovasi Pemerintah di Sektor Pertanian di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan masalah yang akan dibahas dengan menggunakan fokus penelitian yang tertuju pada substansi persoalan. Adapun studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *governing* (perbuatan dan aktivitas memerintah). Konsep *Governing* diartikan sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Gagasan ideal yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

Menurut Eko (2014: 128), Perencanaan dan penganggaran desa ialah bagian dari susunan kelembagaan bagi kemandirian desa. Pasal 19 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tidak menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran menjadi jenis kewenangan desa, namun secara prinsipil keduanya merupakan kewenangan melekat (atributif) desa. Sebelumnya perencanaan desa merupakan bagian dari perencanaan Kabupaten/Kota, sehingga makna perencanaan lebih banyak mengusulkan ke atas ketimbang mengambil keputusan tingkat lokal. Namun sekarang perencanaan desa adalah *village self planning* yang berdiri sendiri dan diputuskan secara mandiri oleh desa. Antara perencanaan desa dan perencanaan saling mengacu agar terjadi *interlinkage* dan terkonsolidasi dengan baik.

Karena itu jargon "satu desa, satu rencana dan satu anggaran" merupakan semangat dan perspektif yang menonjol dalam Undang-undang Desa. Sejalan dengan prinsip kewenangan asal usul dan kewenangan lokal

berskala desa diatur dan diurus sendiri oleh desa, perspektif satu desa, satu rencana, satu anggaran dimaksudkan untuk dua hal. Pertama, desa mempunyai hak kewenangan untuk keputusan tentang perencanaan dan penganggaran secara mandiri, sesuai dengan konteks dan kepentingan masyarakat setempat. Kedua, membentengi imposisi dan mutilasi proyek masuk desa yang datang dari K/L mau pun SKPD, yang selama ini membuat desa sebagai outlet atau pasar perencanaan dan penganggaran (Eko, 2014: 128).

Perencanaan desa sebagai bentuk keputusan lokal itu merupakan jantung kemandirian desa. Desa mengambil keputusan kolektif yang menjadi dasar pijakan bagi eksistensi desa yang berguna untuk warga. Salah satu keputusan penting yang harus diambil dalam perencanaan desa adalah alokasi anggaran, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), yang tidak hanya untuk membiayai konsumsi pemerintah desa, bukan juga hanya untuk membangun prasarana fisik desa, tetapi alokasi untuk investasi manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan. Perencanaan dan penganggaran desa itu menjadi arena untuk membangun dan mengembangkan makna identitas dan eksistensi desa, sekaligus untuk persemaian demokrasi lokal. Identitas dan eksistensi desa itu bisa di wujudkan dalam bentuk mulai pemetaan sosial hingga pengambilan keputusan secara kolektif, sehingga hal ini merintis apa yang di sebut sebagai tradisi berdesa. Desa menjadi identitas dan arena kolektif bagi warga.

Menurut Kessa (2015; 48), dalam buku Perencanaan Pembangunan Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi, pembangunan desa

berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan/atau daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor atau program daerah diserahkan kepada pemerintah desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Dan harus melalui mekanisme pembahsan dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan program yang dilakukan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat Desa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan pokok menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Inovasi Pemerintah Desa Di Sektor Pertanian Di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman?”

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengeksplorasi Inovasi Pemerintah Desa di Sektor Pertanian di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dan diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan serta informasi terkait Inovasi Pemerintah Desa di Sektor Pertanian di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa agar memberikan inovasi di sektor pertanian di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

F. Literature Review

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendayana (2009), dengan judul Strategi Optimalisasi Inovasi Kelembagaan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kondisi eksisting dan indikator kelembagaan pangan yang optimal, sehingga dapat disusun strategi pencapaian kelembagaan ketahanan pangan yang optimal di daerah. Sumber data dan informasi utama dalam bahasan ini adalah publikasi hasil kajian ketahanan pangan yang tersedia di pustaka maupun hasil penelusuran (*surfing*) internet. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian tersebut yaitu:

- a. Keberhasilan ketahanan pangan, tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi semata, akan tetapi juga ditentukan oleh unsur kelembagaan pendukungnya, baik yang bersifat formal maupun non formal. Teknologi menjadi syarat keharusan sedangkan kelembagaan merupakan syarat kecukupan;
- b. Keberadaan kelembagaan formal maupun non formal memiliki peran strategis dan krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan di level nasional maupun daerah dalam perannya memfasilitasi akses terhadap teknologi yang telah tersedia maupun teknologi yang diperlukan tetapi belum tersedia, menyediakan kebutuhan petani, fasilitasi modal kerja dan pemasaran;

- c. Kelembagaan ketersediaan pangan yang optimal dicirikan oleh konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan yang mencakup prinsip kebutuhan, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, manfaat, pemerataan dan keberlanjutan,
- d. Untuk mencapai kondisi kelembagaan ketersediaan ketahanan pangan yang optimal diperlukan strategi diawali dengan melakukan inventarisasi elemen lembaga yang sudah ada kemudian menumbuhkan elemen lembaga yang dibutuhkan tetapi belum tersedia dan atau menumbuhkan elemen lembaga yang sudah ada tetapi belum berfungsi efektif dan efisien dalam pengelolaan pangan di daerah; dan terakhir menumbuhkan keterkaitan yang harmonis secara fungsional dan secara institusional antar elemen kelembagaan ketahanan pangan (Hendayana et al., 2009)

Pada penelitian selanjutnya, masih berkaitan dengan pangan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Utara (2020), dengan judul Adopsi Inovasi Kawasan Rumah Pangan Lestari oleh Kelompok Wanita Tani Pangan Sari di Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara. Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul terkait yaitu bertujuan untuk mengetahui proses adopsi Kawasan Rumah Pangan Lestari dan tingkatannya dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan mengukur skala likert. Studi menemukan proses adopsi dimulai dari kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, konfirmasi dan akhirnya ke tahap adopsi. Hasil dari penelitian menunjukab bahwa tingkat adopsi inovasi Kawasan Rumah Pangan Lestari oleh kelompok tani wanita Pangan Sari tergolong sedang dengan skor maksimal 65,5%. Penelitian ini merekomendasikan petani untuk mengadopsi

inovasi sesuai dengan petunjuk teknis. Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus terus memotivasi masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraannya (Utara et al., 2021).

Pada penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putria dkk (2019), dengan Judul E-Perelek: Penguatan Pangan Melalui Inovasi Kebijakan Berbasis Modal Sosial Dan Teknologi Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam penelitian ini, tujuannya yaitu menganalisis secara kritis implikasi perubahan tradisi Perelek menjadi kebijakan E-Perelek terhadap penjaminan pangan bagi masyarakat kecil di Purwakarta. Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode yang digunakan dalam literature ini yaitu pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Setelah dilakukan penelitian, maka hasil yang didapatkan adalah implementasi kebijakan E-Perelek di Kabupaten Purwakarta melalui modal sosial masyarakat Jawa Barat mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan, Penguatan pangan melalui inovasi kebijakan berbasis modal sosial dan teknologi dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan. Melalui prinsip gotong royong, ketahanan pangan dicapai dengan partisipasi yang bersifat desentralistis (Putria dkk, 2019).

Pada penelitian keempat yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Gafar dkk (2017), dengan tujuan penelitian yaitu Peran Kelompok Tani Dalam Ketahanan Pangan Pada Rumahtangga Petani Kecamatan Camba, Kabupaten Maros (Studi Kasus Lokasi Kegiatan M-P3ml Smartd). Tujuan daripada penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani yang telah diwujudkan: (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan

pangan rumah tangga petani. (3) memutuskan peran kelompok tani dalam ketahanan pangan rumah tangga petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei dengan penelitian explanatory serta menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan hasil yang ditunjukkan yaitu ketersediaan pangan rumah tangga petani di Desa Padaelo dan Desa Timpuseng cukup terpenuhi. Rumah tangga petani di lokasi penelitian frekuensi makan daging sapi atau ayam dan minum susu masih rendah. Sedangkan frekuensi makan telur dan sayur cukup tinggi. Selain itu, didapatkan bahwa di Desa Padaelo terdapat hubungan nyata antara tingkat pendapatan dengan pemanfaatan pangan dan hubungan nyata negatif antara jumlah anggota rumah tangga dengan tingkat stabilitas pangan. Kemudian pada Desa Timpuseng terdapat hubungan nyata antara tingkat pendapatan dengan pemanfaatan pangan, tingkat partisipasi social dengan tingkat stabilitas pangan, serta hubungan nyata negatif antara tingkat partisipasi sosial dengan pemanfaatan pangan. Selain itu juga terdapat hubungan negatif antara tingkat dukungan terhadap produksi pangan dengan akses pangan, tingkat dukungan terhadap distribusi pangan dengan akses pangan (Gafar dkk, 2017).

Pada penelitian selanjutnya yaitu penelitian dengan judul Basis Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Kusumanityas dkk, (2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan atau program apa saja yang dapat dilakukan sebagai bentuk menjaga dan memperkuat

ketahanan pangan keluarga khususnya di daerah pedesaan guna membantu masyarakat dalam pemenuhan salah satu kebutuhan primer berupa pangan. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam hal ketahanan pangan di Desa Candirejo ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu seperti memanfaatkan tanaman yang ada di desa tersebut, pengolahan dan pembudidayaan tanaman umbi-umbian, hingga kebiasaan dari mekanisme bertahan dalam hal pangan warga dapat diubah secara bertahap menjadi kewirausahaan pangan untuk peningkatan kualitas ketahanan pangan. Banyaknya sumber daya tanaman umbi-umbian dapat menjadi sebuah peluang dan potensi bagi warga desa tersebut. Tidak hanya sebagai pengganti beras, tetapi juga dapat menjadi sebuah olahan yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga. (Kusumaningtyas et al., 2021).

Penelitian-penelitian di atas memiliki relevansi dengan topik yang di angkat dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan dalam penelitian di atas yaitu penelitian dahulu juga sama-sama mencoba menjelaskan inovasi yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu peneliti-peneliti terdahulu juga mencoba menelusuri kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait mewujudkan ketahanan pangan. Tetapi penelitian-penelitian terdahulu hanya berusaha mengungkap inovasi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai paket kebijakan skala nasional dan regional. Dengan kalimat lain penelitian terdahulu hanya membahas inovasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara umum, sementara dalam penelitian ini peneliti berusaha mengeksplorasi

lebih spesifik terkait inovasi pemerintah desa di sektor pertanian di tingkat Padukuhan di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

G. Kerangka Konseptual

1. Inovasi

Inovasi harus menjadi sebuah keharusan dalam kehidupan. Hal ini sangat berkaitan dengan kemajuan jaman serta perubahan peradaban teknologi. Dalam proses pembangunan di desa juga membutuhkan inovasi dalam mengelola segala potensi yang ada di desa sehingga memiliki nilai lebih untuk kemajuan dan kemanfaatan bagi warga masyarakat desa itu sendiri. Inovasi adalah faktor paling penting yang menentukan daya saing suatu usaha atau sebuah institusi karena memiliki hubungan pada perubahan dan transfer pengetahuan dan teknologi. Inovasi pembangunan desa memiliki relevansi terhadap semangat nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Inovasi adalah suatu gagasan berupa barang atau hal yang dianggap baru atau belum ada ataupun yang sudah ada tetapi belum diketahui oleh pengadopsi. Selain itu, inovasi juga merupakan metode baru guna meningkatkan mutu atau kualitas terhadap suatu program atau barang yang telah ada, dan berdasarkan hal ini, melalui diskoveri inovasi dapat diperoleh, serta dengan invensi maupun pembaharuan atau peningkatan

suatu produk dengan metode atau cara yang baru (Sa'ud, 2014). Suatu perubahan yang sifatnya khusus (*specific*) yang mengandung kebaruan, dan disengaja melalui suatu program yang direncanakan terlebih dahulu serta dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu sistem tertentu (*goals of the system*) merupakan arti dari sebuah inovasi.

Dari berbagai pendapat diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa inovasi adalah sebuah proses transformasi gagasan atau pengetahuan yang dianggap baru guna melakukan perubahan guna meningkatkan mutu atau kualitas terhadap suatu program atau barang sehingga menemukan sesuatu hal yang baru dengan memiliki nilai lebih dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Desa

Desa menurut Widjaja (2003), dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Pengertian desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kaderisasi desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa disegala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas didalam pengelolaan desa secara demokratis.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Lokal Besekala Desa, menjelaskan bahwa kewenangan lokal bersekala desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah

dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Adapun kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan harus dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003), dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Desa mencakup, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi dan atau pemerintah Kabupaten.

Kewenangan desa yang di atur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman umum kewenangan Desa, penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa pencalonan dan pemilihan serta penetapan perangkat desa, pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pencalonan pemilihan dan dan penetapan anggota badan perwakilan desa, penyusunan dan penetapan anggaran dan pendapatan belanja desa, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, penetapan kerja sama antar desa, penetapan

pinjaman desa, penetapan dan pembentukan badan usaha milik desa, pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah khas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan dana atas bagi hasil, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan Kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD serta memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam buku Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Kessa, 2015).

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah lembaga formal sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan

perangkat desa yang mengatur dan mengurus kehidupan bermasyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplorasi. Menurut Moleong (2008), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami fenomena mengenai hal yang dialami oleh subyek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan maupun dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yang didasarkan pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata dimaksudkan untuk dibuktikan (*verification*), namun dapat saja untuk dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (*falsification*). Dengan demikian, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplorasi.

Metode eksplorasi merupakan sebuah metode guna memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahami, kemudian, menguji kelayakan dalam melakukan penelitian yang mendalam, serta mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian secara mendalam dari hasil penelitian eksplorasi (Siyoto dkk, 2015).

Penelitian eksplorasi adalah studi penjajakan, terlebih khusus tentang pemantapan konsep yang akan digunakan dalam fokus penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Menurut Selltiz (1959) dalam Yusuf (2017), fungsi dari penelitian eksplorasi yaitu dirumuskan dalam masalah yang akan dijadikan prioritas dalam penelitian selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian eksplorasi merupakan penelitian pendahuluan. Melalui penelitian eksplorasi akan di hubungkan di antara gejala/fenomena sosial dan bagaimana bentuk hubungan itu. Adapun tujuan eksplorasi yaitu: (1) menemukan variabel yang berarti dalam situasi lapangan; (2) menemukan hubungan di antara variabel-variabel; (3) meletakkan dasar kerja untuk penelitian selanjutnya, yang sifatnya yaitu pengujian hipotesis yang lebih sistematis dan teliti. Oleh karena itu, penelitian eksplorasi memiliki fungsi strategis dalam kerangka penelitian yang sifatnya rumit dan kompleks. Maka dari itu diperlukan rancangan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Ciri-ciri Penelitian Eksplorasi

Beberapa ciri jenis penelitian ini yang membedakan dari jenis penelitian lain sebagai berikut:

1. Secara harfiah, eksplora berarti menyelidiki atau memeriksa sesuatu. Jadi, penelitian eksploratif ingin menemukan sesuatu apa adanya, sebagai langkah awal untuk mendeskripsikan fenomena tersebut secara lebih jelas dan tuntas.
 2. Penelitian ini terbatas sampelnya.
 3. Studi pendahuluan untuk penelitian yang lebih luas
 4. Instrumen yang digunakan harus mampu mengungkapkan beberapa informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.
 5. Bentuk pertanyaan yang dipakai harus bersifat terbuka daripada yang bersifat terstruktur, sehingga dapat menampung atau mendeteksi beberapa informasi yang dibutuhkan.
 6. Sumber informasi yaitu primer dan sekunder. Kedua sumber tersebut akan saling melengkapi dan menjelaskan.
- b. Langkah-langkah Pokok Penelitian Eksplorasi

Menurut Yusuf (2017), adapun langkah-langkah pokok dalam penelitian eksplorasi sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu ditetapkan bidang yang akan diselidiki dan rumuskan masalahnya secara jelas.
2. Tujuan yang akan dicapai kemudian dirumuskan.
3. Lalu, penelaahan kepustakaan dilakukan guna mendukung pengumpulan informasi lebih mendalam sewaktu di lapangan.
4. Rancangan pendekatannya disusun, adapun rancangannya yaitu cara pengumpulan data, alat pengumpulan data, sumber informasi, latihan para pengumpul data.
5. Data kemudian dikumpulkan sesuai dengan rancangan yang telah disusun.
6. Laporan selanjutnya disusun menurut sistematika tertentu

2. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan fokus permasalahan yang akan diteliti. Adapun fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perencanaan program/kebijakan di sektor pertanian;
2. Penganggaran untuk membiayai program/kebijakan di sektor pertanian;

3. Pelaksanaan program/kebijakan di sektor pertanian;

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan keseluruhan entitas yang di dalamnya mengandung atau melekat objek penelitian, entah itu manusia, benda ataupun institusi terkait. Subyek penelitian mempunyai peran penting, karena pada subyek penelitian itulah data tentang permasalahan yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti, sehingga peneliti harus menentukan informan dalam penelitian. Teknik penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 218). Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan kriteria untuk subyek penelitian.

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT), anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat Padukuhan Nologaten. Subyek penelitian ini dipilih karena berhubungan dengan obyek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Tabel I. 1 Deskripsi Informan

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Jabatan
1	Amirudin Aziz	L	48	Sekretaris Kalurahan
2	Andi Suwarno	L	45	Kasi Kemakmuran
3	Sulistyo Eko Narmono	L	46	Dukuh Nologaten
4	Adi Prasetyo	L	42	BPK
5	Wahyu Hanani	P	46	Ketua KWT
6	Sriminto Ekoati	P	40	Sekretaris KWT
7	Tika Dwianggraini	P	42	Anggota KWT
8	Sri Wiriyaningsih	P	62	Anggota KWT
9	Eko Priantoro	L	45	Tokoh Masyarakat
10	Eko W Widjayanto	L	54	Tokoh Masyarakat
11	Yudi Purnomo	L	48	Tokoh Masyarakat
12	Aniscetus S Jawati	L	69	Tokoh Masyarakat
Jumlah		12 Orang		

Sumber data: Kalurahan Caturtunggal 2021

c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Lokasi ini dipilih karena di lokasi ini usaha mewujudkan ketahanan pangan melalui Kelompok Wanita Tani yang dilakukan oleh pemerintah desa belum berjalan dengan baik. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian haruslah menggunakan metodologi yang benar agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekaligus mempermudah penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk saling melengkapi agar data yang diperoleh benar-benar valid. Beberapa teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data anatar lain:

a. Observasi

Obsevasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Obsrevasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan

tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol kendalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti (Usman dkk, 2006).

Melalui teknik ini, peneliti berusaha untuk menggali data-data penelitian melalui pengamatan terhadap segala bentuk interaksi dan aktivitas yang ada di lokasi penelitian, yang memiliki keterkaitan atau memberikan gambaran tentang obyek yang sedang diteliti. Pada proses observasi peneliti melakukan 3 kali observasi, observasi pertama dilakukan pada bulan Agustus bersamaan dengan Kegiatan Kerja Nyata (KKN) peneliti, observasi kedua dan ketiga dilakukan pada bulan Oktober pada saat proses pengajuan judul skripsi. Pada tahap observasi ini, difokuskan Inovasi apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui Kelompok Wanita Tani.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dengan teknik ini, peneliti akan berusaha untuk menemukan data atau informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan informan yang ada di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi secara rinci dari obyek yang diteliti. Wawancara ini difokuskan pada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, pengurus Kelompok Wanita Tani, anggota Kelompok Wanita Tani dan masyarakat Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal ;

1. Lurah Caturtunggal yang diwakili Sekertaris/Carik
2. Kaur Kemakmuran/Ulu-ulu
3. Dukuh Nologaten
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan(BPKal) Caturtunggal
5. Pengurus Kelompok Wanita Tani/2 orang
6. Anggota Kelompok Wanita Tani/2 orang, dan
7. Tokoh masyarakat(Petani)/4 orang

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, catatan, jurnal, atau laporan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat digunakan sebagai data. Juga bermanfaat untuk memperjelas dan mendukung data-data dari hasil wawancara.

Dalam mengumpulkan data di lapangan peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang dapat diperinci dengan melihat, mencatat, merekam, dan mengabadikan dalam gambar. Selain itu, dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya maka data dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data primer yang dipakai dalam penelitian ini hasil observasi lapangan dan hasil wawancara. Kemudian, data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dokumen profil Kalurahan Caturtunggal, RPJMKal, RKPKal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Inovasi pemerintah di sektor pertanian.

d. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur, salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi padahakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Agar validasi data tetap terjaga dalam teknik penelitian kualitatif penulis menggunakan teknik triangulasi data/sumber (*data triangulation*).

Triangulasi data/sumber (*data triangulation*) adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang di diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan model analisis interaktif. (Milles, 1973) mengatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing* atau *verification*

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik

sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud untuk menguji kebenaran dan kekokohan yang merupakan validasinya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

A. Keadaan Geografis

1. Letak dan Batas Wilayah

Padukuhan Nologaten adalah salah satu padukuhan yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Padukuhan Nologaten adalah 48,5 Ha yang terdiri dari 10 RT dan 4 RW. Secara geografis Padukuhan Nologaten terletak di daerah perbatasan yaitu wilayah Kabupaten Sleman dengan wilayah Kota Yogyakarta. Padukuhan Nologaten terletak di antara:

- a. Derajat Lintang Selatan : $7^{\circ}46'52.3''S$
- b. Derajat Lintang Timur : $110^{\circ}23'59.6''E$

Batas wilayah Padukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman terdiri dari:

- a. Utara : Padukuhan Dadag, Desa Condongcatur
- b. Selatan : Padukuhan Ambarukmo
- c. Barat : Padukuhan Papringan, Desa Condongcatur
- d. Timur : Padukuhan Tempel

2. Orbitrasi

Jarak dari Padukuhan Nologaten ke pusat Kabupaten Sleman yaitu:

- a. Jarak dari Padukuhan Nologaten ke Kantor Kelurahan Caturtunggal adalah 1,3 km;
- b. Jarak dari Padukuhan Nologaten ke Kapanewon Depok adalah 3,1 km;
- c. Jarak dari Padukuhan Nologaten ke Kabupaten adalah 11 km.

B. Keadaan Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah seluruh penduduk di Padukuhan Nologaten sebanyak 1.752 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	869	49.6
2	Perempuan	883	50.4
Jumlah		1.752	100

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 883 jiwa (50.4 %). Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 869 jiwa (49.6 %). Dengan

begitu, selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan berjumlah 14 jiwa. Jadi, populasi penduduk perempuan dan laki-laki hampir berimbang.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan RT

Padukuhan Nologaten mempunyai 10 Rukun Tetangga (RT).

Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan Rukun Tetangga.

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Tetangga (RT)

No	Rukun Tetangga	Jumlah Warga	Persentase (%)
1	RT 01	153	8.73
2	RT 02	124	7.07
3	RT 03	43	2.45
4	RT 04	235	13.41
5	RT 05	188	10.73
6	RT 06	165	9.41
7	RT 07	405	23.11
8	RT 08	136	7.76
9	RT 09	175	9.98
10	RT 10	128	7.30
Jumlah		1.752	100

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Padukuhan Nologaten berjumlah 1.752 jiwa. Penduduk Padukuhan Nologaten tersebar di 10 RT. Mayoritas penduduk Padukuhan Nologaten berdomisili di RT 07 yang mana penduduknya berjumlah

405 jiwa (23.11 %). Sedangkan minoritas penduduk Padukuhan Nologaten berdomisili di RT 03 yang mana penduduknya hanya berjumlah 43 jiwa (2.45 %).

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk bisa menjalani kehidupan yang layak dan bisa memperbaiki perekonomian. Pendidikan masyarakat di Padukuhan Nologaten tergolong maju. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa masyarakat mengenyam pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar/Sederajat sampai tingkat perguruan tinggi (diploma dan sarjana). Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/Sederajat	156	8.90
2	SLTP/Sederajat	206	11.75
3	SLTA/Sederajat	570	32.53
4	Diploma 1	5	00.28
5	Diploma 2	6	00.34
6	Diploma 3	65	3.71
7	Strata 1	308	17.57
8	Strata 2	32	1.82
9	Strata 3	4	00.22
10	Belum Tamat SD	222	12.67
11	Tidak/Belum Sekolah	178	10.15

Jumlah	1.752	100
---------------	--------------	------------

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Padukuhan Nologaten boleh dibilang cukup baik. Tingkat pendidikan masyarakat di Padukuhan Nologaten tergolong maju. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa penduduknya mampu mengakses pendidikan dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Strata 3. Mayoritas penduduk Padukuhan Nologaten pernah mengenyam pendidikan sampai di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Padukuhan Nologaten cukup memadai. Sumber daya manusia yang memadai ini sebetulnya merupakan potensi penting untuk terus menggerakkan perubahan di Padukuhan Nologaten. Artinya, jika potensi sumber daya manusia digunakan dan dikelola dengan baik, maka cita-cita menjadikan Padukuhan Nologaten sebagai entitas yang mandiri, kuat, dan demokratis merupakan suatu keniscayaan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang memadai ini, maka terobosan-terobosan dan ide-ide konstruktif untuk membangun padukuhan dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Meskipun demikian, Pemerintah Padukuhan Nologaten juga diharapkan untuk terus mendorong masyarakatnya untuk mengakses pendidikan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Padukuhan Nologaten adalah membuka akses kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan entah itu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat di Padukuhan Nologaten terdapat 222 jiwa atau sekitar 12.67% masyarakat yang belum menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Selain itu, terdapat 178 jiwa atau sekitar 10.15% masyarakat tidak/belum mengenyam pendidikan.

C. Keadaan Ekonomi

Keadaan perekonomian dapat dilihat dari jenis pekerjaan atau mata pencaharaan yang dilakukan masyarakat. Berikut adalah tabel keadaan ekonomi masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel II.4**Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Karyawan Swasta	304	17.35
2	Wiraswasta	147	8,39
3	Pelajar/Mahasiswa	354	20.40
4	Belum Bekerja	328	18.72
5	Buruh Harian Lepas	29	1.65
6	TNI AU	1	00.57
7	Dosen	22	1.25
8	Pegawai Negeri Sipil	49	2.79
9	Pensiunan	52	2.96
10	Pedangang	18	1.02
11	Perangkat Desa	2	00.11
12	Guru	16	00.91
13	Pembantu Rumah Tangga	2	00.11
14	Pekerjaan Lainnya	4	00.22
15	Polri	7	00.39
16	Peternak	21	00.57
17	Karyawan BUMN	11	00.62
18	Dokter	4	00.22
19	Perawat	2	00.11
20	Notaris	1	00.57
21	Pengacara	3	00.17

22	Tukang Kayu	1	00.57
23	Sopir	3	00.17
24	Wirausaha	2	00.11
25	Karyawan Honorer	8	00.45
26	Juru Masak	1	00.57
27	Petani	76	4,33
28	Mekanik	2	00.11
29	Tukang Jahit	3	00.17
30	TNI	5	00.28
31	Tukang Sol Sepatu	2	00.11
32	Perajin	1	00.57
33	Wartawan	1	00.57
Jumlah		1.752	100

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk sangat bervariasi. Mata pencaharian yang bervariasi ini mengindikasikan bahwa Padukuhan Nologaten merupakan padukuhan sub-urban yang berada di Kelurahan Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Mayoritas penduduk Padukuhan Nologaten bekerja sebagai karyawan swasta yaitu berjumlah 304 jiwa (17.35%). Meskipun demikian, angka pengangguran di Padukuhan Nologaten terbilang masih tinggi yaitu sekitar 18.72%. Di sisi lain, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan hanya berjumlah 76 orang (4,33%). Ini berarti bahwa penduduk Padukuhan Nologaten sudah mulai meninggalkan mata pencaharian sebagai petani. Dengan keadaan seperti ini, maka potensi pertanian dan perkebunan di Padukuhan Nologaten belum dikembangkan secara optimal karena kurangnya Sumber Daya Manusia.

Dengan kenyataan seperti ini, maka perlu adanya inovasi pemerintah terhadap petani di sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup petani dan juga untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Padukuhan Nologaten.

D. Keadaan Sosial

Padukuhan Nologaten terletak di daerah perkotaan. Kehidupan di Padukuhan Nologaten tidak terlepas dari interaksi masyarakat sekitar. Masyarakat di Nologaten masih kental dengan gotong royong, kerja bakti, serta jadwal ronda. Berikut adalah tabel organisasi kemasyarakatan di Padukuhan Nologaten.

Tabel II.5

Organisasi Kemasyarakatan

No	Nama Orgaisasi	Status	Jumlah
1	KKLPMD	Aktif	1
2	BPD	Aktif	1
3	PKK	Aktif	1
4	Dasawisma	Aktif	4
5	Karang Taruna	Aktif	1
6	Posyandu	Aktif	4
7	Kepemudaan	Aktif	2
Total			14

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan masih berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada masa pandemi ini, kegiatan sosial kemasyarakatan jarang dilakukan secara tatap muka (secara langsung). Hal ini terjadi karena ketakutan masyarakat akan bahaya dari pandemi Covid-19. Selain itu, pertemuan tatap muka secara langsung jarang dilakukan demi menjaga kesehatan untuk masyarakat sendiri. Sebagai contoh, selama pandemi Covid-19, kegiatan posyandu dilakukan dengan cara petugas posyandu melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Meskipun lebih banyak mengeluarkan tenaga dan waktu, tetapi petugas posyandu harus melakukannya demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Padukuhan Nologaten.

E. Keadaan Kebudayaan dan Keagamaan

Masyarakat di Padukuhan Nologaten masih melestarikan kegiatan kebudayaan yang dimilikinya. Dalam rangka melestarikan kegiatan kebudayaan ini, masyarakat di Padukuhan Nologaten masih melakukan berbagai kegiatan seperti karawitan, gejog lesung, menyanyikan lagu-lagu daerah, tari-tarian, karnaval dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia (17 Agustus) dengan memakai pakaian petani atau dengan kreasi sayur-sayuran.

Dalam konteks agama, mayoritas masyarakat di Padukuhan Nologaten memeluk agama Islam yaitu sebanyak 1.350 jiwa (77%). Sementara itu, sekitar 1% (18 jiwa) masyarakat di Padukuhan Nologaten

beragama Budha. Sedangkan sebanyak 262 jiwa (15%) masyarakat di Padukuhan Nologaten memeluk agama Katolik dan sebanyak 122 jiwa (7%) masyarakat memeluk agama Protestan. Di Padukuhan Nologaten terdapat 2 masjid yaitu Masjid An Nur dan Masjid Baitur Rohim serta 1 musolla Afiqroh. Masjid di Padukuhan Nologaten bukan hanya sebagai tempat sholat berjemaah saja, tetapi ada pengajian rutin yang diadakan setiap hari Kamis dan Minggu pagi. Setiap hari Kamis ada kegiatan membaca Surat Yasin dan Tahlil, sedangkan pada hari Minggu pagi (setelah subuh) ada kegiatan ceramah agama atau Tausiah.

F. Keadaan Pemerintahan

Tabel berikut ini akan menunjukkan struktur pemerintahan Padukuhan Nologaten.

Tabel II.6

Struktur Pemerintahan

No	Nama Organisasi	Nama Ketua
1	Dukuh	Sulistyo Eko Narmono, A.Md
2	RW 1	Adek Prasetya
3	RW 2	Abdi Manaf
4	RW 3	Jono
5	RW 4	Purwoko

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Dukuh, Bapak Sulistyo Eko Narmono dibantu oleh

empat (4) orang ketua RW. Selain itu, Dukuh juga dibantu oleh sepuluh (10) orang Ketua RT serta lembaga kemasyarakatan seperti PKK, KWT Jasmine, Karang Taruna dan sebagainya.

G. Keadaan Prasarana

Prasarana dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Prasarana meliputi prasarana ibadah, prasarana pendidikan, dan prasarana umum lainnya. Berikut adalah tabel prasarana.

Tabel II.7

Prasarana di Padukuhan Nologaten

No	Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	4
2	Masjid An Nur dan Baitur Rohim	2
3	Musolla Afiqroh	1
4	Pos Kamling	1
5	Paud SPS Jasmine	1
6	TK Kusuma 1	1
7	Gubug Budaya	1
8	Gedung Serba Guna	1
9	Perpustakaan Cinarito	1
10	Sawah KWT	1
11	Galeri Jasmine	1
12	Pasar Desa	1
13	Demokrasi Plot	1

Jumlah	17
---------------	-----------

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa prasarana publik di Padukuhan Nologaten cukup memadai untuk. Prasarana publik ini digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Padukuhan Nologaten. Prasarana publik ini digunakan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, kegiatan ekonomi, kegiatan seni, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan pendidikan dan lain sebagainya.

- Alam, Khaerati, S., Hakim, L., & Razak, A. R. (2019). Pengaruh Partisipasi Kelompok Wanita Tani Terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Appanang Kabupaten Soppeng . *Jurnal Administrasi Publik Vol 5. No 3*.
- Arikunto. (2006). *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asriyanti, S. (2018). Pemberdayaan Peremouan Menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) pada Uasahatani Sayuran di Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ziaraah Vol.43 No.1*.
- Dirhamsyah, T. (2016). *Ketahanan Pangan: Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Rawan Pangan di Jawa*. Yogyakarta: Plantaxia.
- Eko Sutoro. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD).
- Hariyadi, & Dewanti. (2011). *Memproduksi pangan yang Aman*. Jakarta: Dian Rakyat Press.
- Hermanto. (2007). Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima Tani di Sumatra Selatan. *Jurnal Analisis kebijakan pertanian Vol 5. No.2*, 110-125.
- Hermanto. (2007). Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima Tani di Sumatra Selatan. *Jurnal Analisis Keijakan Pertanian Vol 5 (2)*, 110-125.
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta Pusat: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
- Mayanfa'uni, A. (2016). Pembedayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka di RW 02. Kelurahan pertukangan Selatan. *Jurnal Penelitian ilmiah*.
- Milles, M. B. (1973). *Innovation in Education*. New York: Teacher College Press Columbia University.
- Moleong, L. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sa'ud, U. S. (2014). *Inovasi Pendidikan Cet ke VII*. Bandung: Alfabeta.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Liteasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penellitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial (Cetakan keenam)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiranti, D. (2016). Hubungan Antara Tingkat Partisipasi dengan Produktivitas Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Produksi Susun karamel di Desa Tajur Halang Cijeruk Bogor. *Jurnal Penelitian Ilmiah*.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 *Tentang Pangan Nasional*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 *Tentang Pangan*
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 *tentang Pendampingan Desa*
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 *Tentang Kewenangan Lokal Besekala Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 *tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*